

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

DINDA AYU PUSPITASARI

NIM. 19.52.21.274

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh :

DINDA AYU PUSPITASARI

NIM. 19.52.21.274

Surakarta, 31 Januari 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.

NIP. 19841008 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DINDA AYU PUSPITASARI
NIM : 19.52.2.1.274
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Januari 2023



Dinda Ayu Puspitasari

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DINDA AYU PUSPITASARI
NIM : 19.52.21.274
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Januari 2023



Dinda Ayu Puspitasari

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dinda Ayu Puspitasari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dinda Ayu Puspitasari NIM: 19.52.21.274 yang berjudul:

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KULITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Januari 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
NIP. 19841008 201403 2 005

PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)**

Oleh:

DINDA AYU PUSPITASARI

NIM. 19.52.21.274

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 M / 08 Sya'ban 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., C.A.
NIP. 19740302 200003 2 003



Penguji II
Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.
NIP. 19800712 201403 1 003



Penguji III
Frank Aligarh, S.Pd., M.Sc.
NIP. 19920912 201903 1 011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”

(B. J. Habibie)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Jangan lupa bersyukur untuk hari ini”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, serta segala doa yang tak pernah ada hentinya

Sahabat dan partnerku tersayang yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam kehidupan penulis

Teman-teman Akuntansi Syariah A dan G 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan curahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri).” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Khairul Imam, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu Devi Narulitasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu kepada penulis, bimbingan, saran, serta perhatiannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua tercintaku, Bapak Kasibi dan Ibu Mardini, terimakasih atas segala dukungan, doa, semangat dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya dalam segala hal untuk penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Perguruan Tinggi Negeri. Semoga penulis selalu memberikan kebanggaan disetiap perjalanan hidup penulis.
9. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas segala dukungan, doa, nasihat, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. *My Support system*, terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah yang tak pernah henti-hentinya memberikan perhatian, dukungan, doa, nasihat, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Widyaningrum partner *healing* sekaligus bestie tercintaku yang senantiasa menemani dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, yang selalu memberikan dukungan, doa, nasihat, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku tersayang lainnya yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, nasihat, doa, dan semangat yang sangat berkesan dan berarti bagi penulis.
13. Teman-temanku angkatan 2019 terutama Akuntansi Syariah G terimakasih sudah kebersamai dari semester satu hingga empat dan teman-teman Akuntansi Syariah Akademisi A, terimakasih atas segala kebersamaan selama akhir masa perkuliahan ini.
14. Teman-temanku Organisasi HMPS AKS periode 2021 Kabinet Lokajaya yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi serta mengembangkan *softskill*.
15. Keluarga besar Bidikmisi dan KIP-Kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta, terimakasih atas beasiswa dan fasilitas yang sudah diberikan kepada penulis sampai akhir masa studi selesai.
16. Keluarga besar UKM T-MAPS UIN Raden Mas Said Surakarta, terimakasih telah memberikan ruang kepada penulis untuk belajar, berlatih, dan berproses dalam mengembangkan *softskill*.
17. Kesbangpol dan seluruh OPD Kabupaten Wonogiri yang sudah memberikan izin dan sudah sangat banyak membantu saya dalam mempermudah melakukan penelitian.
18. Seluruh pihak lain yang tidak dapat saya sebut satu per satu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Januari 2023

Dinda Ayu Puspitasari

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of human resource capacity, application of government accounting standards, utilization of information technology, internal control systems, and regional financial supervision on the quality of local government financial reports.

This type of research is quantitative with the primary data source in the form of a questionnaire. The population includes all employees in the 25 Regional Apparatus Organizations (OPD) of Wonogiri Regency. The sampling technique used purposive sampling so that a sample of 80 OPD employees was obtained. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study indicate that human resource capacity, application of government accounting standards, utilization of information technology, internal control systems, and regional financial supervision have a positive effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: *Human Resource Capacity, Implementation of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, Regional Financial Supervision, Quality of Regional Government Financial Reports.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Populasi mencakup seluruh pegawai di 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga didapat sampel 80 pegawai OPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.7 Jadwal Penelitian	12

1.8	Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II LANDASAN TEORI		14
2.1	Kajian Teori.....	14
2.1.1	Stewardship Theory	14
2.1.2	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.1.3	Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	17
2.1.4	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	19
2.1.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	21
2.1.6	Sistem Pengendalian Intern.....	23
2.1.7	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan.....	27
2.3	Kerangka Berfikir.....	35
2.4	Hipotesis.....	37
2.4.1	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37
2.4.2	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	38
2.4.3	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
2.4.4	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40
2.4.5	Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian	43
3.2	Jenis Penelitian	43

3.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	43
3.3.1	Populasi.....	43
3.3.2	Sampel.....	45
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	49
3.4	Data dan Sumber Data.....	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Variabel Penelitian	50
3.7	Definisi Operasional Variabel	50
3.8	Teknik Analisis Data	54
3.8.1	Instrumen Penelitian.....	54
3.8.2	Uji Asumsi Klasik	55
3.8.3	Uji Ketepatan Model	57
3.8.4	Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.8.5	Uji Hipotesis	59
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		61
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	61
4.1.1.	Proses Penelitian	61
4.1.2.	Deskripsi Karakteristik Responden.....	62
4.2.	Pengujian dan Hasil Analisis Data	65
4.2.1.	Uji Statistik Deskriptif	65
4.2.2.	Instrumen Penelitian.....	66
4.2.3.	Uji Asumsi Klasik	73
4.2.4.	Uji Ketepatan Model	76
4.2.5.	Analisis Regresi Linier Berganda	78
4.2.6.	Uji Hipotesis	81

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	84
BAB V PENUTUP.....	92
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Keterbatasan Penelitian	93
5.3. Saran Penulis	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan	27
Tabel 3.1 Daftar OPD di Kabupaten Wonogiri.....	44
Tabel 3.2 Penejelasan Sampel.....	45
Tabel 3.3 Responden yang Digunakan Sebagai Sampel.....	46
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 4.1 Data Deskripsi Karakteristik Responden	62
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern.....	70
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan.....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalita.....	74
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F.....	77
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	78
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	79
Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	99
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	101
Lampiran 3 : Rekap Kuesioner	108
Lampiran 4 : Hasil Pengujian.....	124
Lampiran 5 : Surat-surat.....	135
Lampiran 6 : Pendukung	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di negara Indonesia ditandai dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas kelembagaan masyarakat dalam tingkat daerah maupun pusat. Suatu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan mengacu pada UU No.17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara dan UU No.32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah yakni sebagai usaha khusus guna merealisasikan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan pemerintah daerah maupun pusat dengan menyamakan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Dewi & Rini, 2018).

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika laporan berdampak pada pengambilan keputusan (Jatmiko et al., 2020). Oleh sebab itu, organisasi sektor memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan (Yusriwati & Susanti, 2022).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dinilai setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini. Pendapat BPK diberikan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan. Tujuan pemberian opini tersebut

didasarkan kepada empat kriteria, yaitu efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (*disclosure*), serta pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Mahardini & Miranti, 2018).

Terdapat lima jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TM) dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (Mahardini & Miranti, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dijelaskan dalam penelitian ini, faktor pertama yakni kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia berkaitan sangat penting dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu memahami akuntansi keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif (Jatmiko et al., 2020).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berkualitas disusun berdasarkan standar yang berlaku. Standar dan sistem akuntansi harus diterapkan secara konsisten supaya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat

disajikan dengan lengkap dan tepat waktu, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkat dan berkualitas (Putri et al., 2019).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah diharapkan mampu menyediakan informasi atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang digunakan manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan serta pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi informasi atau *hardware* dan *software* guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Binawati, 2022).

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah sistem pengendalian intern. Berkualitasnya suatu laporan keuangan daerah dapat ditentukan melalui seberapa baik dan bagusnya pengendalian internal yang dilakukan pada instansi terkait. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintahan daerah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan terarah yang mampu memberikan dampak dalam penyusunan laporan keuangan yang tentunya berkualitas untuk disajikan (Yusriwati & Susanti, 2022).

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah pengawasan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor yang cukup penting dalam

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik. Adanya pengawasan terwujudnya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penetapan atau evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan kerja dilakukan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, serta sejauh mana tindakan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Iqbal et al., 2022).

Berbagai fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia diduga masih disajikan data yang tidak sesuai serta adanya tindakan penyimpangan yang ditemukan BPK saat penyelenggaraan audit laporan keuangan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tujuh kali berturut-turutnya sejak tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (<https://wonogirikab.go.id>).

Meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bebas dari kesalahan atau kelemahan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri tercatat hanya memperoleh empat catatan yang masih perlu diperkuat guna meningkatkan kinerja manajemen dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah meliputi regulasi, faktor sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan dukungan *stakeholder* (<https://wonogirikab.go.id>).

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (<https://wonogirikab.go.id>).

Temuan dari BPK tersebut diantaranya yaitu a) Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) belum optimal, sehingga mengakibatkan penetapan pajak belum mencakup seluruh potensi pajak daerah. b) Penatausahaan Persediaan pada lima OPD tidak tertib, sehingga mengakibatkan saldo akhir persediaan pada Berita Acara *stock opname* per 31 Desember 2021 pada lima OPD tidak sesuai dengan barang persediaan yang dimiliki (<https://wonogirikab.go.id>).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu penelitian yang dilakukan Yusriwati & Susanti (2022) menunjukkan hasil bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah. SPI dan motivasi kerja tidak ada pengaruhnya secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun secara simultan diketahui bahwa penerapan SAP berbasis akrual, SPI serta motivasi kerja ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Ridzal et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa kapasitas SDM ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi ada pengaruhnya pada kualitas laporan

keuangan daerah. Kemudian pengendalian internal ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Handayani et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif pada kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan. Kompetensi SDM ada pengaruh positif pada kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan.

Penelitian yang dilakukan Bawono et al. (2021) menunjukkan hasil bahwasanya kompetensi SDM ada pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem informasi akuntansi ada pengaruh positif pada kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pengendalian internal ada pengaruh positif pada kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan Jatmiko et al. (2020) menunjukkan hasil kapasitas SDM beserta SPI pemerintahan ada pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penerapan SAP, penggunaan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi kualitas informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Lestari & Dewi (2020) menunjukkan hasil bahwasanya pemahaman akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi, serta sistem pengendalian intern ada pengaruhnya baik simultan maupun parsial pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Yuesti et al. (2020) menunjukkan hasil standar akuntansi pemerintahan terdapat pengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Sistem informasi manajemen daerah ada pengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Ketaatan peraturan ada pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan.

Penelitian yang dilakukan Hartono & Ramdany (2020) menunjukkan hasil bahwasannya ada pengaruh positif yang signifikan pada implementasi standar akuntansi pemerintahan, efektivitas SPIP, serta kompetensi SDM terhadap kualitas pelaporan keuangan baik parsial dan simultan.

Penelitian yang dilakukan Tampubolon & Basid (2019) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta. Kompetensi SDM ada pengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan penggunaan teknologi informasi terdapat pengaruh negatif serta tidak signifikan

pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan Dewi & Rini (2018) menunjukkan hasil bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai informasi. Sumber daya manusia berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap nilai informasi. Teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informasi. Akan tetapi pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi.

Penelitian yang dilakukan Mahardini & Miranti (2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif pada kualitas informasi keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015. Kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas informasi keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015. Secara bersama-sama penerapan standar akuntansi pemerintahan serta kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas informasi keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko et al. (2020) yaitu "*Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence from Indonesia*". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Selain itu penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Jatmiko et al. (2020) menunjukkan hasil

bahwa kapasitas SDM beserta SPI pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi, serta pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi kualitas informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat empat catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada LKPD Wonogiri meskipun mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Terdapat ketidakefisienan atas hasil penelitian terdahulu.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki kefokuskan, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah.
2. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan kajian pada ilmu akademik serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk melaksanakan penelaahan ataupun bukti tambahan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mempelajari mengenai topik yang sama terutama yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti

Dapat memberi wawasan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan daerah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan kepada pihak yang membaca mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan berbagai fenomena yang ada, penelitian-penelitian terdahulu, serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya. Dipaparkan mengenai batasan masalah agar penelitian ini memiliki titik fokus terkait tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas terkait teori yang digunakan dalam penelitian serta menjelaskan variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Dijelaskan pula mengenai kerangka berfikir beserta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas terkait metode penelitian yang berisi bagaimana alur pengolahan data, jumlah populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan alat analisis data yang akan digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Hasil analisis dengan metode penelitian yang digunakan serta uraian hasil yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran guna diajukan penelitian sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari teori keagenan yang dikenal sebagai teori *stewardship*. Menurut Donaldson & Davis (1991) *stewardship theory* menjelaskan bahwa keadaan dan situasi yang membuat manajemen lebih terfokus pada kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Asumsi ini didasarkan pada sifat individu yang bertanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas, serta dapat jujur kepada orang lain.

Teori ini menekankan pada perilaku *steward* yang tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan kepentingan *principal*. Dengan demikian pemerintah daerah dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan masyarakat, melaksanakan tugasnya dengan tepat, serta merencanakan dan melaksanakan anggaran yang dipercayakan kepadanya sehingga tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal (Jatmiko et al., 2020).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yaitu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika berdampak pada pengambilan keputusan (Jatmiko et al., 2020). Oleh sebab itu, organisasi sektor memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan (Yusriwati & Susanti, 2022).

Fungsi dari laporan keuangan sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, maka dari itu harus disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna informasi. Laporan keuangan digunakan untuk menetapkan nilai sumber daya perekonomian yang dipakai dalam melakukan kegiatan bisnis pemerintah, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi serta efektivitas entitas pelaporannya, dan membantu menetapkan apakah mereka mematuhi undang-undang dan peraturan (Handayani et al., 2022).

Komponen dalam laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan kelebihan anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberikan kepada DPR/DPRD serta masyarakat umum setelah audit dilakukan (Jatmiko et al., 2020).

Laporan keuangan tidak dapat dikatakan berkualitas jika laporan tidak berdampak pada pengambilan keputusan, sehingga informasi yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib dapat mendukung dan bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah (Jatmiko et

al., 2020). Kualitas laporan keuangan tentu memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan (Yusriwanti & Susanti, 2022).

Terdapat empat indikator dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Jatmiko et al. (2020), yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan bila mengandung informasi yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaannya dengan membantu meninjau kembali atau mengevaluasi peristiwa lampau ataupun sekarang, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksikan evaluasi masa lalu. Informasi dikatakan relevan jika memiliki umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

2. Handal

Laporan keuangan dikatakan handal jika informasi pada laporan keuangan terhindar dari kesalahan menyesatkan dan dapat memberikan informasi sesuai keadaan sesungguhnya. Informasi mungkin dapat relevan, namun bila sifat atau penyajiannya tidak bisa diandalkan berarti pemakaian informasi tersebut dapat memberi kesesatan.

3. Dapat dibandingkan

Data yang terdapat pada informasi keuangan akan sangat berguna bila bisa dibanding dengan informasi keuangan periode sebelumnya ataupun pada informasi keuangan entitas pelaporan umum lainnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang dihasilkan oleh suatu pelaporan keuangan mudah untuk dimengerti pengguna dengan dituliskan serta dipaparkan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang telah disesuaikan dengan batasan pengetahuan penggunanya. Dengan begitu pengguna laporan keuangan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup.

2.1.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif serta efisien (Hartono & Ramdany, 2020). Kapasitas SDM dapat diamati melalui keterampilan menciptakan *output dan outcome*. Sumber daya manusia sebagai suatu komponen organisasi yang sangat penting. Maka dari itu, wajib dipastikan bahwasanya dalam mengelola SDM yang baik dapat memberikan kontribusi secara maksimal guna tercapainya tujuan organisasi (Jatmiko et al., 2020).

Dalam lingkungan pemerintahan, kompetensi mengacu pada kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam memiliki keterampilan, pengetahuan,

serta sikap tingkah laku saat menjalankan tugas. Jika kompetensi SDM diterapkan secara benar, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Maka dari itu, laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Manusia yang memiliki kompetensi akan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien (Bawono et al., 2021).

Terdapat tiga indikator dari kapasitas sumber daya manusia menurut Jatmiko et al. (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Wawasan ataupun informasi yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan tugas serta tanggung jawab sejalan dengan bidang dimana mereka bekerja. Pengetahuan seorang karyawan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan tugas yang diberikan kepadanya dan dengan pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keahlian

Keahlian adalah upaya dalam melaksanakan tanggung jawab maupun tugas yang diberikan kepadanya. Misalnya, keahlian bekerjasama dengan memahami dan memotivasi individu lainnya baik secara individu maupun berkelompok.

3. Sikap

Sikap adalah pola perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila seseorang memiliki karakteristik yang mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis semua tugas yang diberikan kepadanya dilakukan sebaik-baiknya.

2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam menyusun laporan keuangan tentunya terdapat beberapa standar yang mengatur bagaimana melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintahan secara benar dan baik yang disebut sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian sistem pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan SAP, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan andal sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan (Yuesti et al., 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang merupakan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menjadi pedoman agar pelaporan keuangan di Indonesia khususnya di lingkungan pemerintahan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Jika SAP sudah dipahami, maka mampu menyajikan laporan keuangan yang mencakup laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, neraca, pencatatan laporan keuangan secara benar (Jatmiko et al., 2020).

Tujuan utama penerapan SAP adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan informasi tersebut dirancang untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan bagi pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta pengambilan keputusan. Dengan adanya SAP dapat membantu pengendalian sumber daya manusia atau aparatur daerah dalam

penyusunan laporan keuangan, serta meminimalisir adanya implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan (Yusriwati & Susanti, 2022).

Terdapat lima indikator dari penerapan standar akuntansi pemerintahan menurut Jatmiko et al. (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan standar ini untuk mengatur penyajian informasi keuangan dengan tujuan general untuk meningkatkan keterbandingan informasi keuangan baik mengenai anggaran, antar periode, ataupun entitas. Entitas pelapor menggunakan basis akrual untuk akuntansi dan penyajian laporan keuangan ketika mengakui pendapatan beserta beban, dan juga pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, penyajian laporan realisasi anggaran harus berdasarkan basis yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pernyataan standar ini yaitu mempraktikkan landasan penyajian informasi perwujudan anggaran pemerintah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang bersumber pada aturan UU. Penyajian dalam informasi ini disusun dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan standar ini untuk mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis terkait perubahan kas dan setara kas dalam entitas laporan melalui pengklasifikasian arus kas bersumber pada kegiatan pengoperasian, investasi, pendanaan, dan transitori selama satu periode.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan serta pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

5. Laporan Operasional

Tujuan standar ini untuk membagikan informasi tentang aktivitas operasional keuangan yang terlihat dalam pendapatan LO, beban, serta surplus atau kekurangan operasional dari sesuatu entitas laporan.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi sektor swasta melainkan dalam organisasi sektor publik pemerintahan. Dalam PP No.56 Tahun 2005 terkait Sistem Informasi Keuangan, sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Jatmiko et al., 2020).

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, serta menyebarkan informasi atau data. Dengan adanya teknologi dapat mengatur keuangan daerah serta menyebarkan informasi keuangan daerah pada berbagai pihak secara cepat dan akurat. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi informasi dapat membantu mempercepat pengolahan data transaksi serta menyajikan

laporan keuangan tanpa kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu (Tampubolon & Basid, 2019).

Tujuan utama dari teknologi adalah menyediakan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajemen dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk beroperasi di semua tingkatan dalam suatu organisasi. Selain untuk mengolah dan menyimpan informasi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*), teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi. Oleh karena itu, komputer sebagai bagian dari teknologi informasi atau alat yang dapat meningkatkan kemampuan manusia (Jatmiko et al., 2020).

Terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan sebuah sarana dan prasarana yang memadai dan pandangan atas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah supaya dapat memahami serta menerapkan sistem pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah yang baru, sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam organisasi sektor publik (Jatmiko et al., 2020).

Terdapat tiga indikator dari pemanfaatan teknologi informasi menurut Jatmiko et al. (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Pengolahan informasi dengan jaringan internet, bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah pengolahan informasi dengan memanfaatkan internet.

2. Pemanfaatan teknologi informasi, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana instansi memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki.
3. Pengolahan data, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan data oleh instansi.

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern baik pusat maupun daerah berpedoman pada PP. Tahun 2008 No. 60 tentang SPIP. Pengendalian internal sebagai sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (Jatmiko et al., 2020). Pengendalian internal berkaitan dengan strategi organisasi, proses persiapan, menilai kualitas serta keandalan data akuntansi, peningkatan efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dalam bisnis (Aswar et al., 2021).

Sistem pengendalian intern menjadi peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan organisasi, karena penerapan sistem pengendalian intern akan mampu menciptakan kepercayaan yang memadai. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipatuhi pada setiap tahapan penyusunan pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang diperoleh dapat memiliki nilai kualitas yang tinggi (Ikriyati & Aprilia, 2019).

Menurut PP No.60 Tahun 2008 unsur-unsur sistem pengendalian intern pada aturan pemerintah mengacu pada komponen unsur SPI yang sudah

diaplikasikan dalam lingkungan pemerintahan diberbagai negara, sehingga dapat terealisasikan pengendalian secara baik. Dengan demikian, SPI merupakan fondasi *good governance* dan *first line of defense* dalam melawan ketidakpastian data dan informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Jatmiko et al., 2020).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memberikan jaminan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengelolaan, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas pelaporan keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas pengendalian internal pemerintah, oleh karena itu pemerintah daerah tentunya memiliki sistem pengendalian intern yang baik dan tepat sasaran dalam menjalankan kegiatannya (Yusriwati & Susanti, 2022).

Terdapat lima indikator dari sistem pengendalian intern menurut Jatmiko et al. (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Mendeskripsikan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran serta tindakan personel mengenai pengendalian.

2. Penilaian risiko

Aktivitas evaluasi resiko yang memperhitungkan peluang kejadian yang mengancam pencapaian tujuan lembaga pemerintahan. Pengendalian internal harus menilai risiko yang dihadapi oleh unit organisasi baik secara eksternal maupun internal.

3. Kegiatan pengendalian

Tindakan yang dibutuhkan untuk menanggulangi resiko dan penetapan dalam penerapan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan menanggulangi resiko sudah dilaksanakan dengan cara efisien.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah berkewajiban menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana, serta senantiasa mengelola, mengembangkan, dan memutakhirkan sistem informasi. Instansi pemerintah harus memiliki informasi keuangan serta non-keuangan yang andal mengenai kejadian eksternal dan internal.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan adalah prosedur penilaian kualitas kinerja secara konsisten melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut temuan audit dan saran *review* lainnya.

2.1.7 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan diatur dalam PP No.17(1) Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan pemerintah adalah penetapan standar kinerja dalam perencanaan, perancangan sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah penyimpangan telah terjadi, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber data

organisasi atau pemerintah dipakai seefisien dan seefektif mungkin guna menggapai tujuan organisasi ataupun pemerintah (Dewi & Rini, 2018).

Pengawasan menjadi suatu metode untuk membangun dan memelihara legalitas masyarakat atas kemampuan pemerintahan dengan menghasilkan sistem pengawasan yang efisien, baik pengendalian internal maupun pengendalian eksternal. Umumnya pengawasan ditunjukkan seluruhnya untuk menghindari peluang terbentuknya kecurangan ataupun hal yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat menunjang terlaksananya kebijakan yang sudah ditetapkan guna tercapainya tujuan yang dirancang secara efektif dan efisien (Jatmiko et al., 2020).

Terdapat lima indikator dari pengawasan keuangan pemerintah daerah menurut Jatmiko et al. (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, yaitu pengawasan terhadap instansi yang dilakukan secara efektif dan efisien guna mewujudkan pemerintah yang bersih serta terbebaskan dari KKN.
2. Evaluasi kegiatan, yaitu mengevaluasi setiap aktivitas pengelolaan anggaran (triwulan, semester, dan tahunan).
3. Pencatatan transaksi dan dokumentasi berdasarkan bukti, yaitu mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang cukup dan bukti-bukti yang digunakan untuk landasan pencatatan harus diarsipkan/didokumentasikan dengan baik.

4. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas, yaitu terdapat sistem pengawasan pada tiap pelaksanaan tugas.
5. Laporan OPD sesuai standar akuntansi pemerintahan, yaitu laporan harus didasarkan atas proses akuntansi serta disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan dirancang sesuai waktunya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang relevan jika didukung dengan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Yusriwarti, Novriani Susanti (2022)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SAP Berbasis Akrua - Sistem Pengendalian Intern - Motivasi Kerja 2. Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 	Penerapan SAP berbasis akrua berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern tidak ada pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah.

		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Inhil)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Populasi: Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. 4. Teknik analisis data: Analisis regresi linier berganda. 5. Jenis penelitian: Kuantitatif 	Motivasi kerja tidak ada pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah. Namun secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan daerah.
2	Nining Asniar Ridzal, I Wayan Sujana, Ernawati Malik (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Sumber Daya Manusia - Pemanfaatan Teknologi Informasi - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Populasi: Pegawai yang bekerja pada dinas di Kabupaten Buton Selatan. 4. Teknik analisis data: Uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. 	Kapasitas sumber daya manusia ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan daerah. Pengendalian intern ada pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan daerah.

			5. Jenis penelitian: Kuantitatif	
3	Fice Handayani, Dina Mustika Sari, Adea Yuniarti (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pengendalian Intern - Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Variabel dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Populasi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan. 4. Teknik analisis data: Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. 5. Jenis penelitian: Kuantitatif 	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan.
5	Icuk Rangga Bawono, Agus Suroso, Gema Puja Yuniarso (2021)	<i>Assessing Effect of The Factors that Influence Financial Reporting Information Quality</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Human resources competency</i> - <i>Accounting information system</i> - <i>Internal control</i> 2. Variabel dependen: <i>Quality of Financial</i> 	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem

			<p><i>Reporting Information</i></p> <p>3. Populasi: Pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>4. Teknik analisis data: Analisis regresi linier berganda.</p> <p>Jenis penelitian: Kuantitatif</p>	<p>informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>Pengendalian internal ada pengaruh positif pada kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
7	Bambang Jatmiko, Dadang Irawan, dan Zacky Machmud (2020)	<i>Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence from Indonesia</i>	<p>1. Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Sumber Daya Manusia - Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan - Pemanfaatan Teknologi Informasi - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah <p>2. Variabel dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Populasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes</p>	<p>Kapasitas SDM beserta SPI ada pengaruh positif pada kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, implementasi SAP, penggunaan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi kualitas informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah.</p>

			<p>4. Teknik analisis data: uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi berganda</p> <p>5. Jenis penelitian: kuantitatif</p>	
8	Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<p>1. Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Akuntansi - Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi - Sistem Pengendalian Intern <p>2. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Populasi: Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung</p> <p>4. Teknik analisis data: uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi berganda</p> <p>5. Jenis penelitian: kuantitatif</p>	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9	Anik Yuesti, Made Dwi Adnyana,	<i>Managemen Information Systems and the Quality</i>	<p>1. Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Application of accounting</i> 	SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

	I Gusti Ayu Asri Pramesti (2020)	<i>of Financial Statements in Local Government</i>	<p><i>standards the government</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The use of regional management information systems</i> - <i>Compliance with laws and regulations</i> <p>2. Variabel dependen: <i>Quality of local government financial reports</i></p> <p>3. Populasi: Bagian keuangan masing-masing OPD dan Badan Keuangan Daerah di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.</p> <p>4. Teknik analisis data: Analisis regresi linier berganda.</p> <p>5. Jenis penelitian: Kuantitatif</p>	daerah di Kabupaten Tabanan. Sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tabanan. Ketaatan peraturan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tabanan.
10	Hartono, Ramdany (2020)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<p>1. Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) <p>2. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Populasi: Seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Teknik analisis data: Statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi, dan uji hipotesis dengan alat analisa data menggunakan SPSS versi 24. 5. Jenis penelitian: Kuantitatif 	
11	Fitri Mariana Tampubolon, Ahmad Basid (2019)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen organisasi - Kompetensi Sumber Daya Manusia - Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) 2. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Populasi: Pegawai Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. 4. Teknik analisis data: Uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan 	Komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta. Pemanfaatan teknologi informasi

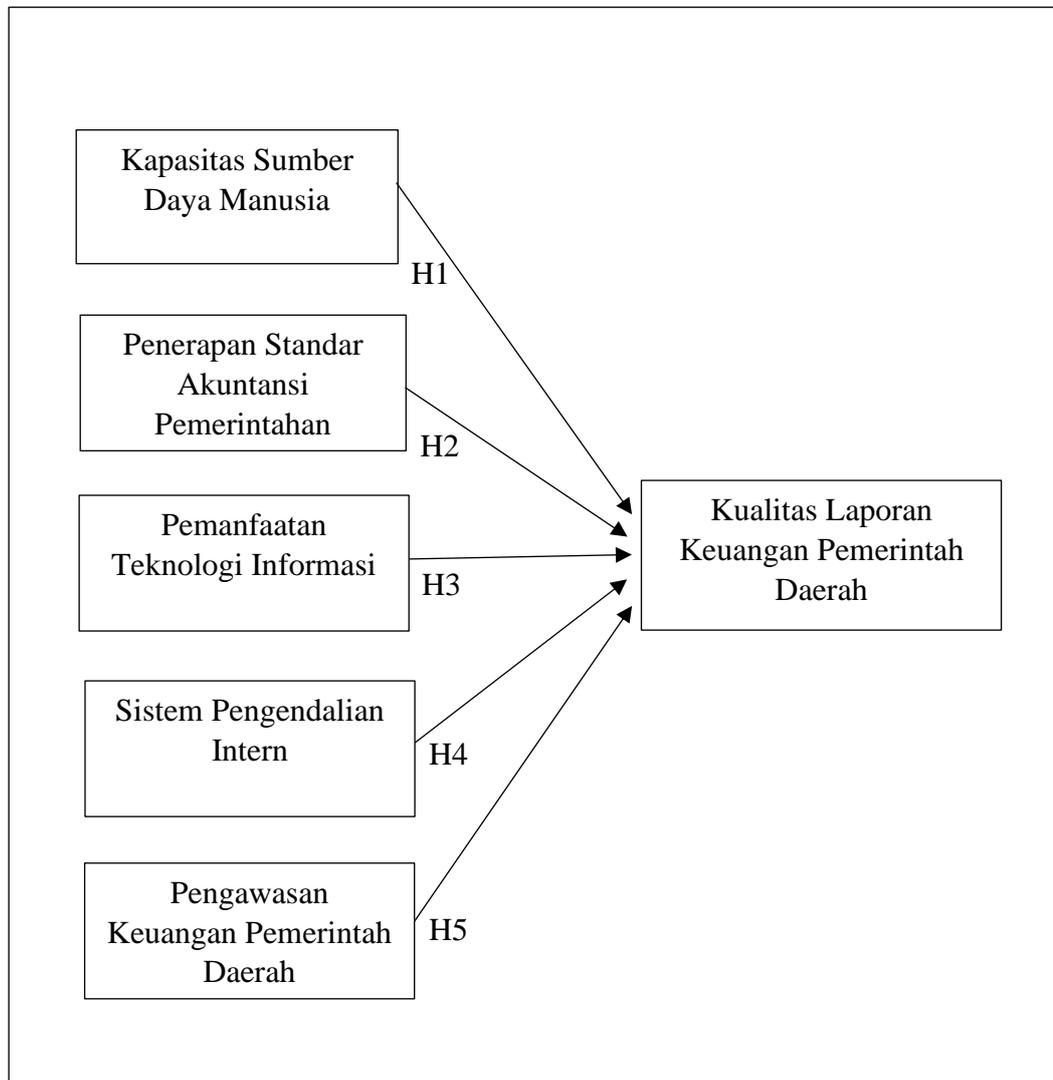
		DKI Jakarta)	software SPSS versi 25.00. 5. Jenis penelitian: Kuantitatif	berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta.
12	Ni Wayan Landya Dewi dan I Gusti Ayu Intan Saputra Rini (2018)	Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	1. Variabel independen: - Pengawasan Keuangan - Sumber Daya Manusia - Teknologi Informasi - Pengendalian Intern 2. Variabel dependen: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Populasi: Pegawai pada Dinas-Dinas di Kabupaten Tabanan. 4. Teknik analisis data: <i>Partial least square</i> dengan menggunakan <i>software SmartPLS 2.0</i> . 5. Jenis penelitian: Kuantitatif	Pengawasan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai informasi. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informasi. Teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informasi. Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi.
13	Nikke Yusnita Mahardini, Ade	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	1. Variabel independen: - Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap

	Miranti (2018)	n Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Populasi: Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 4. Teknik analisis data: Uji validitas dan uji reliabilitas dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 23. <p>Jenis penelitian: Kuantitatif</p>	kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015. Secara serentak atau bersama-sama penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015.
--	----------------	--	--	---

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada kajian teori serta penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, dapat dibentuk kerangka berfikir dari penelitian ini. Kerangka berfikir ini ditujukan untuk membantu dalam menganalisis permasalahan yang akan diselesaikan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh kapasitas sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan

keuangan pemerintah daerah berjalan satu arah untuk menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kapasitas sumber daya manusia sangat penting kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, wajib dipastikan apakah pengelolaan SDM berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Jatmiko et al., 2020). Sumber daya manusia yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan akan mampu menghasilkan kualitas keuangan yang baik (Bonai et al., 2019).

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa sumber daya manusia tidak termotivasi oleh tujuannya sendiri, melainkan lebih ditujukan pada kepentingan organisasi dan senantiasa memaksimalkan kompetensi yang dimiliki dalam menyelesaikan tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi. Apabila kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki bagus, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Tetapi jika sumber daya manusia yang dimiliki tidak kompeten maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan (Pilander et al., 2018).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Jatmiko et al., 2020); (Bawono et al., 2021); (Ridzal et al., 2022); (Handayani et al., 2022); (Tampubolon & Basid, 2019); (Dewi & Rini, 2018); (Hartono & Ramdany, 2020); dan (Mahardini & Miranti, 2018)) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diturunkan dalam penelitian adalah:

H1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menjadi pedoman agar pelaporan keuangan di Indonesia khususnya di lingkungan pemerintahan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Jatmiko et al., 2020). Berkaitan dengan teori *stewardship*, adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan mampu memberikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai keinginan *principal*. Oleh karenanya, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan (Ikriyati & Aprila, 2019).

Dengan adanya penggunaan standar akuntansi pemerintahan ini, tentunya dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Apabila penerapan standar akuntansi pemerintahan di terapkan secara baik dan sesuai peraturan

yang ada, maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat (Yusriwati & Susanti, 2022).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Yuesti et al., 2020); (Yusriwati & Susanti, 2022); (Hartono & Ramdany, 2020); dan (Mahardini & Miranti, 2018)) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diturunkan dalam penelitian adalah:

H2: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi informasi sangat membantu mempercepat pengolahan data transaksi serta menyajikan laporan keuangan tanpa kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu (Tampubolon & Basid, 2019).

Berkaitan dengan teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sebagai upaya terbaik guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, serta menyebarkan

informasi keuangan daerah kepada masyarakat (*principal*). Apabila pemanfaatan teknologi informasi dioptimalkan dan sistem informasi berfungsi dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat (Pilander et al., 2018).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Azlan et al., 2015); (Ridzal et al., 2022); dan (Dewi & Rini, 2018)) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diturunkan dalam penelitian adalah:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern menjadi peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan organisasi, karena penerapan sistem pengendalian intern akan mampu menciptakan kepercayaan yang memadai. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipatuhi pada setiap tahapan penyusunan pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang diperoleh dapat memiliki nilai kualitas yang tinggi (Jatmiko et al., 2020).

Berkaitan dengan teori *stewardship* menjelaskan sifat individu yang berperilaku jujur kepada pihak lain, memiliki integritas, dan dapat dipercaya. Sistem pengendalian internal pemerintah, dimana pemerintah bertanggungjawab memonitoring aktivitas yang dilakukan serta dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah menjalankan sistem pengendalian internal dengan melakukan pengontrolan pada setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan (Ikriyati & Aprila, 2019).

Adanya penerapan sistem pengendalian intern di suatu organisasi dapat memberikan pengarahan, pengawasan, dan pengukuran sumber daya organisasi. Maka dari itu, jika sistem pengendalian dalam suatu organisasi sudah berjalan dengan baik dapat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Utama, 2017).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Jatmiko et al., 2020); (Lestari & Dewi, 2020); (Bawono et al., 2021); (Ridzal et al., 2022); (Handayani et al., 2022); (Dewi & Rini, 2018); dan (Hartono & Ramdany, 2020)) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian di atas, hipotesis yang diturunkan dalam penelitian adalah:

H4: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.5 Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Umumnya pengawasan ditunjukkan seluruhnya untuk menghindari peluang terbentuknya kecurangan ataupun hal yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat menunjang

terlaksananya kebijakan yang sudah ditetapkan guna tercapainya tujuan yang dirancang secara efektif dan efisien (Jatmiko et al., 2020).

Berkaitan dengan teori *stewardship*, pengawasan pemerintah daerah ditunjukkan untuk menjamin apakah pemerintah sudah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengawasan mempunyai peran yang sangat penting karena dalam mencapai keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal. Semakin baik pengawasan keuangan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshori, 2018).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Azlan et al., 2015) dan (Dewi & Rini, 2018) menyatakan bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diturunkan dalam penelitian adalah:

H5: Pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang diperlukan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Wonogiri.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasari pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti beberapa populasi atau sampel, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah yang mencakup objek ataupun subjek dengan karakteristik serta jumlah tertentu yang dipastikan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini

populasi yang diambil adalah seluruh pegawai di 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri dengan jumlah 8.802 orang.

Tabel 3.1

Daftar OPD di Kabupaten Wonogiri

No.	Nama OPD
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri
3.	Inspektorat Kabupaten Wonogiri
4.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri (BKD)
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (BPKD)
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri (BPBD)
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri (Satpol PP)
8.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri (Dinas P&K)
9.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri (DISPORA)
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri (DINKES)
11.	Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (DINSOS)
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (DISDUKCAPIL)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri (Dinas PMD)
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri (Dinas PMPTSP)
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri (Dinas KUKM dan PERINDAG)
17.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri (DISNAKER)

18.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri (DISKOMINFO)
19.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri (DISPERA dan KPP)
20.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri (DPU)
21.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri (Dinas LH)
22.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Wonogiri (DIPERTAN dan PANGAN)
23.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Wonogiri (DISLAPERNAK)
24.	Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri (DISHUB)

Sumber: <https://wonogirikab.go.id>

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili). Dalam penelitian ini menggunakan sampel pegawai OPD di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 100 orang dengan kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penjelasan Sampel

No.	Penjelasan Sampel
1.	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta Staff/Pegawai (keuangan, perencanaan, dan pelaporan).
2.	Keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan pada instansi terkait.

Tabel 3.3
Responden yang Digunakan Sebagai Sampel

No	Nama Instansi	Kabag/ Kabid	Kasubag/ Kasubbid	Staff	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri	1	1	2	4
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri	1	1	2	4
3.	Inspektorat Wonogiri	1	1	2	4
4.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri (BKD)	1	1	2	4
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (BPKD)	1	1	2	4
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri (BPBD)	1	1	2	4
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri (Satpol PP)	1	1	2	4
8.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri (Dinas P&K)	1	1	2	4
9.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri (DISPORA)	1	1	2	4

10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri (DINKES)	1	1	2	4
11.	Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (DINSOS)	1	1	2	4
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A)	1	1	2	4
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (DISDUKCAPIL)	1	1	2	4
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri (Dinas PMD)	1	1	2	4
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri (Dinas PMPTSP)	1	1	2	4
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri (Dinas KUKM dan PERINDAG)	1	1	2	4

17.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri (DISNAKER)	1	1	2	4
18.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri (DISKOMINFO)	1	1	2	4
19.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri (DISPERA dan KPP)	1	1	2	4
20.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri (DPU)	1	1	2	4
21.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri (Dinas LH)	1	1	2	4
22.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Wonogiri (DIPERTAN dan PANGAN)	1	1	2	4
23.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Wonogiri (DISLAPERNAK)	1	1	2	4
24.	Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	1	1	2	4
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri (DISHUB)	1	1	2	4
	TOTAL				100

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *puspositive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) pemilihan sampel didasarkan pada tujuan dan target tertentu secara tidak acak. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta Staff/Pegawai (keuangan, perencanaan, dan pelaporan).
- b. Keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan pada instansi terkait.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data primer. Dimana data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui objek penelitian atau responden, baik secara individu maupun kelompok (Sugiyono, 2017). Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan yang selanjutnya diisi oleh responden yang telah ditentukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Setiap jawaban akan diberi skor satu sampai lima.

Setiap jawaban akan mengandung skor sesuai kriteria yang telah ditentukan dan akan diolah untuk mendapatkan data yang terstruktur.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti dengan maksud akan dipelajari guna memperoleh informasi terkait suatu hal yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan (Sugiyono, 2017). Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel bebas dari penelitian ini adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), Sistem Pengendalian Intern (X_4), dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X_5).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasional

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari setiap variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasional variabel dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur tentang laporan posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengelola organisasi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan. (Jatmiko et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Handal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Jatmiko et al., 2020)	Skala Likert 1-5
2	Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan guna menggapai tujuannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keahlian 3. Sikap (Jatmiko et al., 2020)	Skala Likert 1-5

		secara efektif dan efisien. Kapasitas SDM bisa diamati dari kemampuan menciptakan <i>output dan outcome</i> . (Jatmiko et al., 2020)		
3	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang merupakan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menjadi pedoman agar pelaporan keuangan di Indonesia khususnya di lingkungan pemerintahan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas (Jatmiko et al., 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Laporan Operasional (Jatmiko et al., 2020)	Skala Likert 1-5
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dalam PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan adanya teknologi dapat mengelola keuangan daerah dan mendistribusikan informasi keuangan secara cepat dan akurat. (Jatmiko et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan informasi 2. Pemanfaatan teknologi informasi 3. Pengolahan data (Jatmiko et al., 2020)	Skala Likert 1-5

5	Sistem Pengendalian Intern	Sistem pengendalian intern pemerintahan baik pusat maupun daerah berpedoman pada PP. Tahun 2008 No. 60 tentang SPIP. Pengendalian internal merupakan sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan berperan penting dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan. (Jatmiko et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi <p>(Jatmiko et al., 2020)</p>	Skala Likert 1-5
6	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan ditunjukkan seluruhnya untuk menghindari peluang terbentuknya kecurangan ataupun hal yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat menunjang terlaksananya kebijakan yang sudah ditetapkan guna tercapainya tujuan yang dirancang secara efektif dan efisien. (Jatmiko et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 2. Evaluasi kegiatan 3. Pencatatan transaksi dan dokumentasi berdasarkan bukti 4. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas 5. Laporan OPD sesuai standar akuntansi pemerintahan <p>(Jatmiko et al., 2020)</p>	Skala Likert 1-5

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam pengumpulan data. Data pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan menggunakan angket (kuesioner). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert satu sampai lima, dengan perincian berikut ini:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Variabel yang diukur dalam kuesioner meliputi: 1) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2) Kapasitas sumber daya manusia, 3) Penerapan standar akuntansi pemerintahan, 4) Pemanfaatan teknologi informasi, 5) Sistem pengendalian intern, dan 6) Pengawasan keuangan pemerintah daerah. Supaya kuesioner teruji validitas serta keandalannya, akan dibutuhkan pengujian instrument penelitian yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid ataupun sah tidaknya kuesioner. Kuesioner dinyatakan sah manakala pertanyaan dalam kuesionernya

dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yakni dengan memperhitungkan korelasi diantara nilai setiap pertanyaan terhadap jumlah nilai. Jika *Pearson Correlation* yang diperoleh mempunyai nilai tidak melebihi 0,05 maka data yang didapatkan adalah valid (Sugiyono, 2017).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sesuatu angket (kuesioner), yang merupakan indikator dari variabel ataupun konstruk. Suatu angket dikatakan andal ataupun reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tidak berubah-ubah ataupun konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan andal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Sugiyono, 2017).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghindari adanya bias yang akan menyimpang, sehingga data tersebut dapat diolah dan model regresi yang dihasilkan valid karena sesuai dengan asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas (Sugiyono, 2017).

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2017) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi

normal atau tidak yaitu dengan uji analisis statistik. Uji analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal. Uji K-S dilakukan dengan hipotesis. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. H_0 : Data residual berdistribusi normal.
- b. H_a : Data residual berdistribusi tidak normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu observasi ke observasi lain. Bila varians dari residual suatu observasi ke observasi yang lain masih serupa, maka disebut homoskedastisitas dan jika berlainan dikatakan heteroskedastisitas.

Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya > 0,05. Sebaliknya, terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya < 0,05 (Sugiyono, 2017).

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat dari

nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang biasanya dipakai untuk membuktikan terdapatnya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ ataupun serupa dengan nilai $VIF < 10$ maka tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan sebaliknya (Sugiyono, 2017).

3.8.3 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah model regresi yang dibuat oleh peneliti itu baik/signifikan atau tidak baik/tidak signifikan, atau dapat dikatakan sebagai uji kecocokan proporsionalitas antara hasil pengamatan tertentu dengan nilai yang diharapkan atau frekuensi teoritis (Sugiyono, 2017). Ketentuan untuk menilai hasil hipotesis uji f berupa level signifikansi 0,05 sebagai berikut:

- a. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti model penelitian ini fit atau layak.
- b. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti model penelitian ini tidak fit atau tidak layak.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan nilai antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai

yang mendekati satu artinya bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Sugiyono, 2017).

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2017).

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_4	= Sistem Pengendalian Intern
X_5	= Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
ε	= <i>Standar error</i>

3.8.5 Uji Hipotesis

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan atas dasar perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan (Sugiyono, 2017). Ketentuan untuk menilai hasil hipotesis uji statistik t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sebagai berikut:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah kapasitas sumber daya manusia (X_1), penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3), sistem pengendalian intern (X_4),

dan pengawasan keuangan pemerintah daerah (X_5) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Wonogiri. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 25 untuk menganalisis hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Wonogiri dengan jumlah penyebaran kuesioner sebanyak 100 kuesioner. Penelitian dilakukan dari tanggal 18 November 2022 hingga tanggal 16 Desember 2022 dan kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner artinya tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Akan tetapi kuesioner yang dapat diolah adalah 80 kuesioner yang memenuhi kriteria sampel.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden meliputi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta Staff/Pegawai (keuangan, perencanaan, dan pelaporan) yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan di masing-masing OPD. Selanjutnya untuk pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang dikirimkan langsung oleh peneliti ke seluruh OPD di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari sekretariat, inspektorat, dinas, dan badan.

Proses penyebaran kuesioner dimulai dengan beberapa langkah yaitu dari pembuatan surat izin penelitian oleh kampus yang ditujukan kepada Kepala Kesbangpol yang akan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proses ini membutuhkan waktu 1 hari. Surat izin penelitian dari Dekan

dikirimkan langsung kepada Kesbangpol secara offline untuk meminta surat persetujuan penelitian di OPD Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya kesbangpol membuat surat izin penelitian yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana dalam proses pembuatan surat tersebut membutuhkan waktu selama 6 hari.

Penyebaran kuesioner dilakukan selama 2 hari setelah keluarnya surat izin penelitian dari Kesbangpol. Sedangkan untuk pengambilan kuesioner dilakukan dalam waktu 3 minggu. Selanjutnya proses pengisian masing-masing OPD dimulai dari 1-3 minggu.

4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, dalam hal ini karakteristik yang dimaksud meliputi data responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan dan lama bekerja di OPD. Data deskripsi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tabel Data Deskripsi Karakteristik Responden

No	Kriteria	Jumlah	Presentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	- Laki-Laki	29 Responden	36.3%
	- Perempuan	51 Responden	63.7%
	Jumlah	80 Responden	100%
2	Usia		
	- <25 Tahun	2 Responden	2.5%
	- 26-35 Tahun	15 Responden	18.8%
	- 36-45 Tahun	25 Responden	31.3%
	- >46 Tahun	38 Responden	47.5%
	Jumlah	80 Responden	100%

3	Pendidikan Terakhir		
	- D3	4 Responden	5%
	- D4	2 Responden	2.5%
	- S1	56 Responden	70%
	- S2	18 Responden	22.5%
	- S3	0 Responden	0%
	Jumlah	80 Responden	100%
4	Latar Belakang Pendidikan		
	- Akuntansi	33 Responden	41.3%
	- Manajemen	28 Responden	35%
	- IT	6 Responden	7.5%
	- Lainnya	13 Responden	16.3%
	Jumlah	80 Responden	100%
5	Jabatan		
	- Kabag/Kabid	8 Responden	10%
	- Kasubbag/Kasubbid	22 Responden	27.5%
	- Staff Keuangan	50 Responden	62.5%
	Jumlah	80 Responden	100%
6	Lama Bekerja di OPD		
	- <5 Tahun	5 Responden	6.3%
	- 6-15 Tahun	8 Responden	10%
	- 16-25 Tahun	27 Responden	33.8%
	- >25 Tahun	40 Responden	50%
	Jumlah	80 Responden	100%

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data bahwa dari 80 responden, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 responden atau 36,3%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 51 responden atau 63,7%, dapat kita lihat bahwa responden terbanyak yaitu perempuan.

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data bahwa dari 80 responden, dengan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 2 responden atau 2,5%, responden dengan usia 26-35 tahun sebanyak 15 responden atau 18,8%, lalu untuk responden dengan usia 36-45 tahun sebanyak 25 atau 31,3% dan untuk usia responden lebih dari 46 tahun sebanyak 38 responden atau 47,5%. Sehingga responden paling

sedikit dengan usia kurang dari 25 tahun dan responden terbanyak dengan usia lebih dari 46 tahun.

Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh data bahwa dari 80 responden, dengan Pendidikan terakhir D3 sebanyak 4 responden atau 5%, responden dengan Pendidikan D4 sebanyak 2 atau 2.5%, kemudian responden dengan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 56 atau 70%, dan untuk responden dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 18 atau 22.5%. Pada kriteria ini dapat kita lihat bahwa responden paling sedikit dengan Pendidikan terakhir D4, responden paling banyak dengan tingkat Pendidikan terakhir S1, sedangkan tidak ada yang Pendidikan terakhir S3.

Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh data bahwa dari 80 responden, responden dengan latar belakang Pendidikan Akuntansi sebanyak 33 atau 41.3%, responden dengan latar belakang Manajemen sebanyak 28 atau 35%, lalu untuk responden dengan latar belakang IT sebanyak 6 atau 7.5% dan latar belakang lainnya sebanyak 13 atau 16.3%. Dapat dilihat paling sedikit ialah dengan latar belakang IT dan paling banyak dengan latar belakang Pendidikan Akuntansi.

Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh data bahwa dari 80 responden, responden dengan jabatan Kabag/kabid sebanyak 8 atau 10%, responden dengan jabatan kasubag/kasubid sebanyak 22 atau 27.5%, lalu untuk responden dengan jabatan staff keuangan sebanyak 50 atau 62.5%. Sehingga responden paling

sedikit dengan jabatan kabag/kabid dan untuk responden terbanyak dengan jabatan sebagai staff keuangan.

Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh data dari 80 responden, responden dengan lama bekerja kurang dari 5 tahun sebanyak 5 atau 6.3%, responden dengan lama kerja 6-15 tahun sebanyak 8 atau 10%, responden dengan lama kerja 16-25 tahun sebanyak 27 atau 33.8% dan untuk responden lama kerja lebih dari 25 tahun sebanyak 40 responden atau 50%. Sehingga responden paling sedikit dengan lama bekerja kurang dari 5 tahun dan responden paling banyak dengan lama kerja lebih dari 25 tahun.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kapasitas Sumber Daya Manusia	80	19	25	21.91	1.802
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	80	19	25	21.84	2.131
Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	20	25	21.85	2.081
Sistem Pengendalian Intern	80	20	25	21.48	1.949
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80	20	25	21.71	2.124
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80	15	25	21.58	2.293
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa pada kapasitas sumber daya manusia terdiri dari 5 item pernyataan. Setiap responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimum 19 dan maksimum 25 dengan rata-rata jawaban 21,91 serta standar deviasi 1,802. Kemudian variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan 5 item pernyataan memiliki nilai minimum 19 dan nilai maksimum 25. Rata-rata jawaban 21,84 dengan standar deviasi 2,131.

Pemanfaatan teknologi informasi dengan 5 item pernyataan memiliki nilai minimum 20 dan maksimum 25 serta rata-rata 21,85 dengan standar deviasi 2,081. Sistem pengendalian intern memiliki 5 item pernyataan dengan nilai minimum 20, nilai maksimum 25, rata-rata 21,48 dan standar deviasi 1,949.

Selanjutnya Pengawasan keuangan pemerintah daerah memiliki 5 item pernyataan dengan nilai minimum 20 dan nilai maksimum 25. Rata-rata jawaban 21,71 dengan standar deviasi 2,124. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki 5 item pernyataan dengan total jawaban minimum 15 dan maksimum 25, rata-rata 21,58 serta standar deviasi 2,293.

4.2.2. Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk mengukur valid ataupun sah tidaknya kuesioner digunakan uji validitas. Suatu kuesioner dinyatakan sah manakala pernyataan dalam kuesionernya dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation*

yakni dengan memperhitungkan korelasi diantara nilai setiap pernyataan terhadap jumlah nilai.

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Tabel 4.3

Uji Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)			
Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,792	0,2199	Valid
X1.2	0,810	0,2199	Valid
X1.3	0,826	0,2199	Valid
X1.4	0,749	0,2199	Valid
X1.5	0,734	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji validitas pada tiap variabel terdapat 5 pernyataan dinyatakan valid. Masing-masing variabel valid dengan nilai r_{hitung} pada keseluruhan indikator pernyataan yang telah diuji bernilai positif serta nilainya lebih besar daripada r_{tabel} . Dalam penelitian ini diperoleh dari $(df-2) = 78$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga nilai dari r_{tabel} sebesar 0,2199. Karena nilai r_{hitung} secara keseluruhan lebih besar dari r_{tabel} maka disimpulkan untuk semua indikator pernyataan kapasitas sumber daya manusia dikatakan valid dan layak digunakan.

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tabel 4.4

Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)			
Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0,845	0,2199	Valid
X2.2	0,876	0,2199	Valid
X2.3	0,900	0,2199	Valid
X2.4	0,899	0,2199	Valid
X2.5	0,816	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas pada tiap variabel terdapat 5 pernyataan dinyatakan valid. Masing-masing variabel valid dengan nilai r_{hitung} pada keseluruhan indikator pernyataan yang telah diuji bernilai positif serta nilainya lebih besar daripada r_{tabel} . Dalam penelitian ini diperoleh dari $(df-2) = 78$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga nilai dari r_{tabel} sebesar 0,2199. Karena nilai r_{hitung} secara keseluruhan lebih besar dari r_{tabel} maka disimpulkan untuk semua indikator pernyataan penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan valid dan layak digunakan.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel 4.5

Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)			
Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X3.1	0,903	0,2199	Valid
X3.2	0,847	0,2199	Valid
X3.3	0,884	0,2199	Valid
X3.4	0,894	0,2199	Valid
X3.5	0,893	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji validitas pada tiap variabel terdapat 5 pernyataan dinyatakan valid. Masing-masing variabel valid dengan nilai r_{hitung} pada keseluruhan indikator pernyataan yang telah diuji bernilai positif serta nilainya lebih besar daripada r_{tabel} . Dalam penelitian ini diperoleh dari $(df-2) = 78$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga nilai dari r_{tabel} sebesar 0,2199. Karena nilai r_{hitung} secara keseluruhan lebih besar dari r_{tabel} maka disimpulkan untuk semua indikator pernyataan pemanfaatan teknologi informasi dikatakan valid dan layak digunakan.

d. Sistem Pengendalian Intern

Tabel 4.6

Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (X4)			
Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X4.1	0,874	0,2199	Valid
X4.2	0,733	0,2199	Valid
X4.3	0,882	0,2199	Valid
X4.4	0,900	0,2199	Valid
X4.5	0,880	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas pada tiap variabel terdapat 5 pernyataan dinyatakan valid. Masing-masing variabel valid dengan nilai r_{hitung} pada keseluruhan indikator pernyataan yang telah diuji bernilai positif serta nilainya lebih besar daripada r_{tabel} . Dalam penelitian ini diperoleh dari $(df-2) = 78$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga nilai dari r_{tabel} sebesar 0,2199. Karena nilai r_{hitung} secara keseluruhan lebih besar dari r_{tabel} maka disimpulkan untuk semua indikator pernyataan sistem pengendalian intern dikatakan valid dan layak digunakan.

e. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.7

Uji Validitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X5)			
Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X5.1	0,908	0,2199	Valid
X5.2	0,907	0,2199	Valid
X5.3	0,903	0,2199	Valid
X5.4	0,893	0,2199	Valid
X5.5	0,865	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas pada tiap variabel terdapat 5 pernyataan dinyatakan valid. Masing-masing variabel valid dengan nilai r_{hitung} pada keseluruhan indikator pernyataan yang telah diuji bernilai positif serta nilainya lebih besar daripada r_{tabel} . Dalam penelitian ini diperoleh dari $(df-2) = 78$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga nilai dari r_{tabel} sebesar 0,2199. Karena nilai r_{hitung} secara keseluruhan lebih besar dari r_{tabel} maka disimpulkan untuk semua indikator pernyataan pengawasan keuangan pemerintah daerah valid dan layak digunakan.

f. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.8

Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)			
Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Y1	0,899	0,2199	Valid
Y2	0,896	0,2199	Valid
Y3	0,944	0,2199	Valid
Y4	0,902	0,2199	Valid
Y5	0,921	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.3.6 hasil uji validitas pada tiap variabel terdapat 5 pernyataan dinyatakan valid. Masing-masing variabel valid dengan nilai r_{hitung} pada keseluruhan indikator pernyataan yang telah diuji bernilai positif serta nilainya lebih besar daripada r_{tabel} . Dalam penelitian ini diperoleh dari $(df-2) = 78$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga nilai dari r_{tabel} sebesar 0,2199. Karena nilai r_{hitung} secara keseluruhan lebih besar dari r_{tabel} maka disimpulkan untuk semua indikator pernyataan kualitas laporan keuangan daerah valid dan layak digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Nilai *cronbach's alpha* (α) menunjukkan pengukuran uji reliabilitas. Jika besar α lebih tinggi dari 0,60 maka seluruh item pernyataan di dalam variabel tersebut dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai	Kriteria <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0.835	> 0,60	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0.914	> 0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.930	> 0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0.907	> 0,60	Reliabel
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0.938	> 0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.949	> 0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Pada tabel 4.10 dari uji reliabilitas pada nilai hitung *cronbach's alpha* dalam variabel menunjukkan angka > 0,60. Maka reliabilitas dapat diterima. Dalam hal ini dimasing-masing variabel menunjukkan nilai dari *cronbach's alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan disetiap variabel dinyatakan reliabilitas.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Metode ini digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji analisis statistik. Uji analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44341233
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.141
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* yang telah dilakukan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,156 yang mana artinya $0,156 > 0,05$. Dalam uji ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan memenuhi asumsi normalitas atau dengan kata lain data yang digunakan dalam penelitian normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pada dasarnya uji glejser digunakan untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$. Sebaliknya, jika terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $< 0,05$.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0.254	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0.260	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.360	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern	0.397	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0.250	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data olah SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.12 pada kolom bagian sig menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen nilai dari signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan pada penelitian dengan menggunakan variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan.

3. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang biasanya dipakai untuk membuktikan terdapatnya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ ataupun serupa dengan nilai $VIF < 10$ maka tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan sebaliknya.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0.917	1.090	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0.209	4.779	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.117	8.528	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern	0.137	7.321	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0.137	7.326	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Syarat tidak terjadi gejala multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang berarti model regresi pada penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

4.2.4. Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukan apakah model regresi yang dibuat oleh peneliti itu baik/signifikan atau tidak baik/tidak signifikan, atau dapat dikatakan sebagai uji kecocokan proporsionalitas antara hasil pengamatan tertentu dengan nilai yang diharapkan atau frekuensi teoritis.

Tabel 4.13
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250.958	5	50.192	22.566	.000 ^b
	Residual	164.592	74	2.224		
	Total	415.550	79			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Hasil olad data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.14 dari hasil uji F diatas, dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar $22,566 > F_{tabel} (2,34)$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Besarnya dari nilai signifikansi 0,000 dari hasil tersebut $< 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan nilai antara nol sampai dengan satu. Nilai *adjusted R²* yang mendekati satu artinya bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.604	.577	1.491

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,577. Untuk penelitian ini menggunakan lima variabel independen, sehingga fokus kita pada nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,577. Artinya 57,7% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah dan sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) dengan jumlah lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.092	1.950		6.073	.000
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.163	.069	.179	2.642	.000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.241	.155	.249	3.655	.002
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.378	.222	.365	2.716	.001
Sistem Pengendalian Intern	.254	.056	.444	3.234	.002
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	.389	.214	.360	4.018	.003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan adanya persamaan garis regresi linear sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

$$Y = 8,092 + 0,163 X_1 + 0,241 X_2 + 0,378 X_3 + 0,254 X_4 + 0,389 X_5 + e$$

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi linear berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai suatu kostanta (*constant*) dalam penelitian ini sebesar 8,092. Yang artinya nilai independen (variabel kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi

informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah) dianggap konstan. Maka rata-rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 8,092.

- b. Nilai koefisien regresi variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) adalah 0,163 yang menunjukkan apabila kapasitas sumber daya manusia baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,163.
- c. Nilai koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X2) adalah 0,241 yang menunjukkan apabila penerapan standar akuntansi pemerintahan baik, maka akan menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,241.
- d. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) adalah 0,378 yang menunjukkan apabila pemanfaatan teknologi semakin baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,378.
- e. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern (X4) adalah 0,254 yang menunjukkan apabila sistem pengendalian intern ditingkatkan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,254.
- f. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan pemerintah daerah (X5) adalah 0,389 yang menunjukkan apabila pengawasan keuangan pemerintah daerah terus ditingkatkan, maka akan menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,389.

4.2.6. Uji Hipotesis

Uji statistik t pada dasarnya diperlukan untuk menjawab hipotesis yaitu ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penentuan ada atau tidaknya pengaruh dengan membandingkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima begitu juga sebaliknya.

Tabel 4.16

Rekap Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	Pernyataan	Nilai T hitung	Signifikansi	Keterangan
H1	Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2,642	0,000	H0 ditolak, H1 diterima
H2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,655	0,002	H0 ditolak, H2 diterima
H3	Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2,716	0,001	H0 ditolak, H3 diterima
H4	Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,234	0,002	H0 ditolak, H4 diterima

H5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4,018	0,003	H0 ditolak, H5 diterima
----	---	-------	-------	-------------------------

Sumber: Hasil olah data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan nilai dari signifikansi setiap variabelnya yang terdiri dari variabel independen (kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah) serta variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri). Berikut rekap hasil uji hipotesis diuraikan sebagai berikut:

1. Skor angka signifikansi variabel kapasitas sumber daya manusia yaitu 0,000. Nilai ini berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 2,642 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Hasil dari angka tersebut dapat diartikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengarah ke arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 pada kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima.
2. Skor angka signifikansi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu 0,002. Nilai ini berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 3,655 lebih besar dari t_{tabel}

1,99085. Hasil dari angka tersebut dapat diartikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengarah ke arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

3. Skor angka signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu 0,001. Nilai ini berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 2,716 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Hasil dari angka tersebut dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengarah ke arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 pada pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima.
4. Skor angka signifikansi variabel sistem pengendalian intern yaitu 0,002. Nilai ini berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 3,234 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Hasil dari angka tersebut dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengarah ke arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 pada sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

5. Skor angka signifikansi variabel pengawasan keuangan daerah yaitu 0,003. Nilai ini berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 4,018 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Hasil dari angka tersebut dapat diartikan bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengarah ke arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 pada pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukkan hasil bahwa H_1 diterima, yang artinya kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,000. Nilai tersebut berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 2,642 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Dengan demikian jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima.

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 58,75% para pegawai di OPD Kabupaten Wonogiri memahami dan mengetahui tugas pokok, teknik kerja menurut etika, dan siklus akuntansi dengan baik. Para pegawai mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan terkait penyusunan dan penatausahaan laporan keuangan juga telah diikuti oleh para pegawai di OPD Kabupaten Wonogiri serta sikap para pegawai yang mengutamakan etika dan kode etik. Selain itu dengan adanya pengalaman kerja yang cukup lama pegawai bekerja lebih dari 25 tahun, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dan berkualitas sesuai standar yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mahardini & Miranti (2018) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan sumber daya yang memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, karena apabila sumber daya semakin memiliki kemampuan yang kompeten maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Pujanira & Taman (2017) yang menyebutkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Apabila SDM yang dimiliki dikelola dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Sumber daya yang berkompeten akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien, sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara tepat waktu.

4.3.2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukkan hasil bahwa H_2 diterima, yang artinya variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,002. Nilai tersebut berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 3,655 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Dengan demikian jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_2 diterima.

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 68,75% pada setiap instansi/OPD Kabupaten Wonogiri selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, ekuitas dan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, pendapatan belanja dan pembiayaan. Instansi/OPD selalu menyusun/menyajikan laporan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan arus kas.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan di setiap OPD Kabupaten Wonogiri sudah diterapkan dengan baik. Sesuai dengan tujuan dari adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga mampu

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jauhari et al. (2021) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini membuktikan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk penyusunan dan penyajian LKPD, jika standar akuntansi pemerintah diterapkan secara tepat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dibidang akuntabilitas keuangan menjadi salah satu penentu kualitas LKPD.

Hal ini juga didukung penelitian Ikriyati & Aprila (2019) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan SAP, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

4.3.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukkan hasil bahwa H_3 diterima, yang artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,001. Nilai tersebut berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 2,716

lebih besar dari $t_{\text{tabel}} 1,99085$. Dengan demikian jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_3 diterima.

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 70% pegawai OPD Kabupaten Wonogiri sudah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dengan menggunakan komputer dalam melaksanakan tugasnya dan memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi akan membantu dan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan daerah serta mengoreksi data agar terhindar dari kesalahan atau kecurangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shofa et al. (2022) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik pemanfaatan teknologi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan menggunakan sistem yang berbasis komputerisasi dan terintegrasi, setiap transaksi yang terjadi akan langsung dicatat dan diposting kedalam sistem yang digunakan. Sehingga lebih mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Sejalan dengan penelitian Ridzal et al. (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi sudah digunakan secara optimal seperti

penggunaan komputer, software/perangkat lunak dan lainnya yang sejenis. Penggunaan secara optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4.3.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukkan hasil bahwa H_4 diterima, yang artinya variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,002. Nilai tersebut berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 3,234 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Dengan demikian jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_4 diterima.

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 76,25% para pegawai OPD Kabupaten Wonogiri memahami dan menerapkan sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan. Artinya dari kelima unsur pengendalian tersebut telah dilaksanakan secara efektif, karena sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aziyah & Yanto (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adanya pengendalian internal yang baik akan

memudahkan proses pencapaian target yang telah dibuat pemerintah, sehingga mampu menciptakan informasi keuangan yang berkualitas.

Didukung pula dengan penelitian Wulandari & Octaviani (2020) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas pelaporan keuangan daerah. Semakin optimal penerapan sistem pengendalian intern akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena fungsi dari sistem pengendalian intern itu sendiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan serta efektifitas dan efisiensi operasi.

4.3.5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukkan hasil bahwa H_5 diterima, yang artinya variabel pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,003. Nilai tersebut berada di bawah angka kriteria yaitu 0,05, sedangkan jika dilihat dari t_{hitung} senilai 4,018 lebih besar dari t_{tabel} 1,99085. Dengan demikian jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_5 diterima.

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 81,25% pada setiap OPD di lingkungan Kabupaten Wonogiri terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah.

Selain itu, setiap laporan keuangan melampirkan pencatatan transaksi dan disertai dengan dokumentasi serta dalam penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian sistem akan berjalan dengan baik jika terdapat pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana guna mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan keuangan di setiap instansi agar menghasilkan laporan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti et al. (2020) menyebutkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan. Perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semua proses berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut andal.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Putra (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya jika pengawasan di dalam suatu OPD baik, terkontrol, dan tersistem maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan semakin baik pula.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tanpa disertai dengan wawancara atau pertanyaan lisan sehingga data yang diperoleh mungkin belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 57,7%, sehingga dapat diketahui terdapat 42,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

5.3. Saran Penulis

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yang diajukan terhadap pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan daerah penelitian termasuk OPD di Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan kedepannya dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan SAP yang sesuai standar peraturan dengan memanfaatkan teknologi, serta adanya sistem pengendalian intern yang baik, pengawasan keuangan yang optimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul) Muhamad. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 66–77.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977–989.
- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 188–198.
- Bawono, I. R., Suroso, A., & Yuniarso, G. P. (2021). Assessing Effect of The Factors that Influence Financial Reporting Information Quality. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 107–116. <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n2.p107-116>
- Binawati, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten. *Jurnal OPTIMAL*, 19(1), 19–39.
- Dewi, N. W. L., & Rini, I. G. A. I. S. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 63–69.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. *JIAK: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 9–20. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v3i1.1147>
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh Sap, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23.

<https://wonogirikab.go.id>

- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Iqbal, M., Sofwan, S. V., & Mariam, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 1–15.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(32), 89–100. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0026>
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang, Standar Pemeriksaan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ayat 1 Tahun 2005 tentang, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang, Sistem Informasi Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- Pilander, S. M., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 9(2), 128–139.

- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nomial*, 6(4), 14–28.
- Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 163–177.
- Putri, H. P. A., AR, S., & Periansya. (2019). Pengaruh Kompetensi, SPI dan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 139–153.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094–3104. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Shofa, A., Wafirotn, K. Z., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 128–144.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, F. M., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55–65.
- Tomasoa, T. F., Meiman, H., & Audit, I. (2022). Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Insepkotarat Kota Ambon dan Provinsi Maluku. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JPE)*, 2(1), 22–27.
- Utama, R. J. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1429–1443.
- Wulandari, D. R., & Octaviani, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Aktual: Journal of Accounting and Financial*, 5(1), 1–12.

- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–8.
- Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Management information systems and the quality of financial statements in local government. *Journal of Public Affairs*, 1–7. <https://doi.org/10.1002/pa.2462>
- Yusriwati, & Susanti, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Inhil). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 34–44.

LAMPIRAN

No.	Bulan	Desember				Januari			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konsultasi		x	x				x	x
2	Penyusunan proposal								
3	Revisi proposal								
4	Pendaftaran Semprop								
5	Seminar Proposal								
6	Pengumpulan Data	x	x	x					
7	Analisis Data				x	x			
8	Penulisan Akhir Skripsi				x	x	x	x	x
9	Pendaftaran Munaqosah								
10	Sidang Munaqosah								
11	Revisi Skripsi								

No.	Bulan	Februari				Maret			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konsultasi								
2	Penyusunan proposal								
3	Revisi proposal								
4	Pendaftaran Semprop								
5	Seminar Proposal								
6	Pengumpulan Data								
7	Analisis Data								
8	Penulisan Akhir Skripsi								
9	Pendaftaran Munaqosah		x						
10	Sidang Munaqosah					x			
11	Revisi Skripsi					x	x		

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Responden

Saya Dinda Ayu Puspitasari Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, memohon kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian saya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”.

Kuesioner ini dibuat sebagai sarana dalam rangka mendukung pembuatan proposal skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Sehubungan dengan hal tersebut saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian secara objektif. Data yang Bapak/Ibu isikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian saya. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya

(Dinda Ayu Puspitasari)

A. Identitas Responden

Nama Instansi/Lembaga :

:

Nama Responden :(boleh tidak di isi)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : <25 Tahun 26-35 Tahun

36-45 Tahun >46 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA D3 D4

S1 S2 S3

Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen

IT Lainnya

Jabatan : Kabag/Kabid Kasubag/Kasubid

Staff Keu Lainnya

Lama Bekerja di OPD : <5 Tahun 6-15 Tahun

16-25 Tahun >25 Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Dimohon Bapak/Ibu untuk membaca setiap pernyataan kuisisioner secara hati-hati dan menjawab pernyataan dalam kuisisioner ini dengan lengkap. Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Bapak/Ibu. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut.

Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut dengan memberi *checklist* atau tanda centang (√) pada pilihan kolom yang tersedia. Kuisisioner ini terdapat 5 pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

4 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

5 = Sangat Setuju (SS)

3 = Netral (N)

Catatan: Mengisi pilihan netral jika Bapak/Ibu tidak mengetahui atau tidak memahami pernyataan yang dimaksud atau belum pernah mengalami.

A. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
3	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
5	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.					

B. Kapasitas Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik.					
2	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.					
3	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.					

4	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.					
5	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.					

C. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Instansi di tempat saya bekerja selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, ekuitas dan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, pendapatan belanja dan pembiayaan.					
2	Instansi di tempat saya bekerja selalu menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran.					
3	Instansi di tempat saya bekerja selalu menyusun/menyajikan laporan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan arus kas.					
4	Instansi di tempat saya bekerja selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
5	Instansi di tempat saya bekerja selalu menyusun dan menyajikan Laporan Operasional menggunakan akuntansi berbasis akrual.					

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Penerapan sistem akuntansi pada instansi tempat saya bekerja sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					

2	Pada instansi tempat saya bekerja sudah terpasang jaringan internet dan telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
3	Sub bagian keuangan tempat saya bekerja sudah menggunakan <i>software</i> aplikasi akuntansi.					
4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah dilakukan dengan baik.					
5	Pada instansi tempat saya bekerja, pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan perundang-undangan.					

E. Sistem Pengendalian Intern

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Setiap instansi memiliki integritas dan kode etik tertulis yang diterapkan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan pegawai/staf.					
2	Pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh tentang dampak pelaksanaan program dan kegiatan.					
3	Setiap transaksi dan aktivitas telah didukung dengan otorisasi dan pihak yang berwenang.					
4	Informasi disediakan tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					
5	Adanya pengawasan secara terus menerus dan periodik terhadap laporan keuangan.					

F. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah.					
2	Terdapat evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.					
3	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
4	Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan.					
5	APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					

Lampiran 3
Rekap Kuesioner

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan	Lama Kerja
1	Laki-laki	>46 tahun	S1	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
2	Laki-laki	26-35 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	16-25 tahun
3	Perempuan	26-35 tahun	D3	Akuntansi	Staff Keuangan	6-15 tahun
4	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Lainnya	Staff Keuangan	6-15 tahun
5	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
6	Laki-laki	>46 tahun	S2	Akuntansi	Kabag/Kabid	>25 tahun
7	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
8	Perempuan	<25 tahun	S1	IT	Staff Keuangan	<5 tahun
9	Laki-laki	26-35 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	16-25 tahun
10	Laki-laki	>46 tahun	S1	Akuntansi	Kabag/Kabid	>25 tahun
11	Perempuan	>46 tahun	S1	Lainnya	Staff Keuangan	>25 tahun
12	Perempuan	36-45 tahun	S2	Manajemen	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
13	Perempuan	26-35 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	6-15 tahun
14	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
15	Perempuan	>46 tahun	S2	Akuntansi	Kabag/Kabid	>25 tahun
16	Perempuan	26-35 tahun	S2	Akuntansi	Staff Keuangan	<5 tahun
17	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
18	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
19	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	16-25 tahun

20	Perempuan	26-35 tahun	S1	IT	Staff Keuangan	<5 tahun
21	Laki-laki	>46 tahun	S1	Lainnya	Staff Keuangan	>25 tahun
22	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
23	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	16-25 tahun
24	Laki-laki	>46 tahun	S1	Akuntansi	Kabag/Kabid	>25 tahun
25	Perempuan	36-45 tahun	S2	Akuntansi	Staff Keuangan	16-25 tahun
26	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
27	Laki-laki	26-35 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	6-15 tahun
28	Perempuan	<25 tahun	D3	Lainnya	Staff Keuangan	<5 tahun
29	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
30	Perempuan	>46 tahun	S2	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
31	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	16-25 tahun
32	Perempuan	>46 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
33	Perempuan	>46 tahun	S2	Manajemen	Staff Keuangan	16-25 tahun
34	Laki-laki	36-45 tahun	S2	Manajemen	Kabag/Kabid	16-25 tahun
35	Perempuan	>46 tahun	S1	Lainnya	Staff Keuangan	>25 tahun
36	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Manajemen	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
37	Perempuan	<25 tahun	D3	IT	Staff Keuangan	<5 tahun
38	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
39	Perempuan	>46 tahun	S2	Manajemen	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
40	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
41	Perempuan	>46 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	>25 tahun

42	Perempuan	26-35 tahun	D3	Lainnya	Staff Keuangan	6-15 tahun
43	Perempuan	>46 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
44	Perempuan	26-35 tahun	D4	Akuntansi	Staff Keuangan	6-15 tahun
45	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
46	Perempuan	26-35 tahun	S1	TI	Staff Keuangan	16-25 tahun
47	Perempuan	>46 tahun	S2	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
48	Laki-laki	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
49	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	<5 tahun
50	Perempuan	>46 tahun	S2	Manajemen	Kabag/Kabid	16-25 tahun
51	Laki-laki	>46 tahun	S1	Lainnya	Staff Keuangan	>25 tahun
52	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
53	Laki-laki	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
54	Laki-laki	36-45 tahun	D4	Lainnya	Staff Keuangan	16-25 tahun
55	Perempuan	>46 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
56	Perempuan	36-45 tahun	S2	Manajemen	Kabag/Kabid	>25 tahun
57	Laki-laki	26-35 tahun	S1	IT	Staff Keuangan	16-25 tahun
58	Perempuan	>46 tahun	S2	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
59	Perempuan	26-35 tahun	S1	Lainnya	Staff Keuangan	6-15 tahun
60	Perempuan	>46 tahun	S2	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
61	Laki-laki	>46 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	16-25 tahun
62	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
63	Perempuan	>46 tahun	S2	Lainnya	Kasubag/Kasubid	>25 tahun

64	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
65	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	6-15 tahun
66	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Lainnya	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
67	Perempuan	26-35 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	6-15 tahun
68	Perempuan	>46 tahun	S1	Lainnya	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
69	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	6-15 tahun
70	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	>25 tahun
71	Laki-laki	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
72	Perempuan	>46 tahun	S2	Lainnya	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun
73	Perempuan	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	6-15 tahun
74	Perempuan	>46 tahun	S1	Manajemen	Staff Keuangan	>25 tahun
75	Perempuan	>46 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	16-25 tahun
76	Laki-laki	>46 tahun	S2	Manajemen	Kasubag/Kasubid	>25 tahun
77	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Staff Keuangan	16-25 tahun
78	Perempuan	36-45 tahun	S2	Manajemen	Kabag/Kabid	>25 tahun
79	Perempuan	36-45 tahun	S1	IT	Staff Keuangan	16-25 tahun
80	Laki-laki	36-45 tahun	S1	Akuntansi	Kasubag/Kasubid	16-25 tahun

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (X1)					
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL
5	5	5	5	4	24
4	5	4	4	4	21
4	5	4	4	4	21
4	5	4	4	4	21
4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
4	5	5	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	4	22
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	3	22
4	4	4	5	5	22
4	4	5	5	4	22
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	5	23
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	3	23
4	4	4	4	5	21
4	4	4	5	5	22

5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	3	5	5	5	22
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	3	23
4	5	4	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
5	4	4	3	4	20
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	4	24
4	5	5	5	5	24
4	5	5	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	22
4	4	4	5	4	21
4	4	5	5	4	22

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (X2)					
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
4	4	3	4	4	19
4	5	4	4	4	21

4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	4	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	5	22
4	4	5	5	4	22
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	4	24
4	5	5	5	4	23
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	3	4	4	5	20
4	4	4	4	5	21

5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	3	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X3)					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25

4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	5	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
5	5	4	4	4	22
5	5	4	4	4	22
5	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	5	3	4	20
4	5	5	5	5	24
4	5	5	4	4	22
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	4	23
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25

4	4	5	5	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	3	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	4	23
4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
5	5	5	4	4	23
3	4	5	5	3	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	4	4	4	22

SISTEM PENGENDALIAN INTER (X4)					
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TOTAL
4	4	4	4	4	20
2	5	4	5	4	20
3	5	5	3	4	20
3	5	4	5	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25

5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	5	4	4	4	21
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	4	5	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	3	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	5	4	5	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
5	4	5	5	3	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
5	5	5	4	5	24
5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	3	21
4	5	4	4	4	21
4	5	4	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (X5)					
X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TOTAL
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	4	22
5	4	5	4	4	22
5	4	5	4	4	22
5	4	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	23
5	5	4	4	5	23
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25

5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	4	4	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)					
Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TOTAL Y
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	5	24
5	5	5	4	5	24
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25

4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
5	5	4	4	4	22
5	4	4	4	4	21
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	3	4	4	4	18
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25

5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	22
4	5	5	5	5	24
5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

Lampiran 4
Hasil Pengujian

Karakteristik Responden

		Jenis_Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	29	36.3	36.3	36.3
	Perempuan	51	63.7	63.7	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25 Tahun	2	2.5	2.5	2.5
	26-35 Tahun	15	18.8	18.8	21.3
	36-45 Tahun	25	31.3	31.3	52.5
	>46 Tahun	38	47.5	47.5	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

		Pendidikan_Terakhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	4	5.0	5.0	5.0
	D4	2	2.5	2.5	7.5
	S1	56	70.0	70.0	77.5
	S2	18	22.5	22.5	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

		Latar Belakang_Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akuntansi	33	41.3	41.3	41.3
	Manajemen	28	35.0	35.0	76.3
	IT	6	7.5	7.5	83.8
	Lainnya	13	16.3	16.3	100.0

Total	80	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kabag/Kabid	8	10.0	10.0	10.0
	Kasubag/Kasubid	22	27.5	27.5	37.5
	Staff Keuangan	50	62.5	62.5	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

Lama_Bekerja_di_OPD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 Tahun	5	6.3	6.3	6.3
	6-15 Tahun	8	10.0	10.0	16.3
	16-25 Tahun	27	33.8	33.8	50.0
	>25 Tahun	40	50.0	50.0	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kapasitas Sumber Daya Manusia	80	19	25	21.91	1.802
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	80	19	25	21.84	2.131
Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	20	25	21.85	2.081
Sistem Pengendalian Intern	80	20	25	21.48	1.949
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80	20	25	21.71	2.124
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80	15	25	21.58	2.293
Valid N (listwise)	80				

Uji Validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Kapasitas Sumber Daya Manusia
X1.1	Pearson Correlation	1	.527**	.679**	.367**	.625**	.792**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X1.2	Pearson Correlation	.527**	1	.555**	.512**	.551**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X1.3	Pearson Correlation	.679**	.555**	1	.551**	.448**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X1.4	Pearson Correlation	.367**	.512**	.551**	1	.362**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.001	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X1.5	Pearson Correlation	.625**	.551**	.448**	.362**	1	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	.792**	.810**	.826**	.749**	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah an
X2.1	Pearson Correlation	1	.635**	.749**	.737**	.560**	.845**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	.635**	1	.766**	.714**	.664**	.876**

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.3	Pearson Correlation	.749**	.766**	1	.799**	.598**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.4	Pearson Correlation	.737**	.714**	.799**	1	.680**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.5	Pearson Correlation	.560**	.664**	.598**	.680**	1	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	.845**	.876**	.900**	.899**	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X3.1	Pearson Correlation	1	.818**	.732**	.732**	.709**	.903**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.2	Pearson Correlation	.818**	1	.686**	.624**	.613**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.3	Pearson Correlation	.732**	.686**	1	.725**	.759**	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.4	Pearson Correlation	.732**	.624**	.725**	1	.873**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.5	Pearson Correlation	.709**	.613**	.759**	.873**	1	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000

	N	80	80	80	80	80	80
Pemanfaatan	Pearson Correlation	.903**	.847**	.884**	.894**	.893**	1
Teknologi	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
Informasi	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Sistem Pengendalian Intern
X4.1	Pearson Correlation	1	.468**	.696**	.858**	.666**	.874**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X4.2	Pearson Correlation	.468**	1	.616**	.485**	.606**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X4.3	Pearson Correlation	.696**	.616**	1	.726**	.748**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X4.4	Pearson Correlation	.858**	.485**	.726**	1	.746**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X4.5	Pearson Correlation	.666**	.606**	.748**	.746**	1	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Sistem Pengendalian Intern	Pearson Correlation	.874**	.733**	.882**	.900**	.880**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
X5.1	Pearson Correlation	1	.747**	.825**	.716**	.761**	.908**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X5.2	Pearson Correlation	.747**	1	.755**	.781**	.778**	.907**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X5.3	Pearson Correlation	.825**	.755**	1	.817**	.641**	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X5.4	Pearson Correlation	.716**	.781**	.817**	1	.696**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X5.5	Pearson Correlation	.761**	.778**	.641**	.696**	1	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	.908**	.907**	.903**	.893**	.865**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Y.1	Pearson Correlation	1	.839**	.758**	.730**	.758**	.899**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
Y.2	Pearson Correlation	.839**	1	.784**	.711**	.736**	.896**

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
Y.3	Pearson Correlation	.758**	.784**	1	.875**	.898**	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
Y.4	Pearson Correlation	.730**	.711**	.875**	1	.821**	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
Y.5	Pearson Correlation	.758**	.736**	.898**	.821**	1	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	.899**	.896**	.944**	.902**	.921**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas Kapasitas SDM

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.835	5

Reliabilitas Penerapan SAP

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.914	5

Reliabilitas Pemanfaatan TI

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	5

Reliabilitas SPI

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	5

Reliabilitas Pengawasan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.938	5

Reliabilitas Kualitas LKPD

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.949	5

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44341233
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.141
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.476	2.584		1.076	.997
	Kapasitas Sumber Daya Manusia	.203	.952	.223	.955	.254
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	-.133	.117	-.271	-1.134	.260
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.154	.168	.294	.920	.360
	Sistem Pengendalian Intern	-.133	.156	-.252	-.852	.397
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	.235	.182	.430	1.456	.250

a. Dependent Variable: ABS

Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kapasitas Sumber Daya Manusia	.917	1.090
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.209	4.779
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.117	8.528
	Sistem Pengendalian Intern	.137	7.321
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	.137	7.326

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250.958	5	50.192	22.566	.000 ^b
	Residual	164.592	74	2.224		
	Total	415.550	79			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.604	.577	1.491

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.092	1.950		6.073	.000
	Kapasitas Sumber Daya Manusia	.163	.069	.179	2.642	.000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.241	.155	.249	3.655	.002
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.378	.222	.365	2.716	.001
	Sistem Pengendalian Intern	.254	.056	.444	3.234	.002

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	.389	.214	.360	4.018	.003
--	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji T (Uji Hipotesis)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.092	1.950		6.073	.000
	Kapasitas Sumber Daya Manusia	.163	.069	.179	2.642	.000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.241	.155	.249	3.655	.002
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.378	.222	.365	2.716	.001
	Sistem Pengendalian Intern	.254	.056	.444	3.234	.002
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	.389	.214	.360	4.018	.003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran 5
Surat-surat



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373
Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman : http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

Wonogiri, 22 November 2022

Nomor : 071/817
Sifat : Biasa
Penhal : Rekomendasi
Penelitian.

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri
Di -
WONOGIRI

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, bersama ini disampaikan rekomendasi Nomor : 071/151 Tanggal 22 November 2022 Atas nama DINDA AYU PUSPITASARI, dengan judul :

Analisis Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.


An. BUPATI WONOGIRI
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rahmat Imam Santosa
RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos., MP.
Pembina Tk. I
NIP. 19681224 199003 1 003

Tembusan, Kepada Yth.

1. Bupati Wonogiri, sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Wonogiri;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373

Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman : http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :071/ 451

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan :

- Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor : B-3516/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/11/2022, Tanggal 16 November 2022

Bupati Wonogiri Melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri, **memberikan rekomendasi** kepada :

1. Nama : **DINDA AYU PUSPITASARI**
2. Alamat : Sembung RT 002/RW 006, Canden, Sambu, Boyolali
3. No.Telp dan Email : 088215293840/dindapuspitasari387@gmail.com
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : **Analisis Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)**
- b. Tempat/Lokasi : Terlampir
- c. Bidang : Akuntansi
- d. Waktu : 21 November 2022 s/d 21 Mei 2023
- e. Penanggung Jawab : Dr Awan Kostrad Diharjo, S.E.M.Ag
- f. Status : Baru
- g. Anggota : -
- h. Nama Lembaga : UIN Raden Mas Said Surakarta
- i. Jenis : **Skripsi**
- j. Keterangan : **Mematuhi Protokol Kesehatan**

KETENTUAN YANG HARUS DITAATI ADALAH :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
4. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima
6. Setelah pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya berupa **hard copy dan soft copy** kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu dapat diajukan kembali kepada instansi pemohon dengan menyertakan surat pengantar yang telah diperbarui.
8. Mentaati Protokol Kesehatan disaat Pandemi Covid-19

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Wonogiri, 22 November 2022

An. BUPATI WONOGIRI

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos.,MP.

Pembina Tk. I

NIP. 19681224 199003 1 003

LAMPIRAN LOKASI PENELITIAN

No.	Nama OPD
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri
3.	Inspektorat Kab. Wonogiri
4.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
8.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
9.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
11.	Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri
12.	Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri
17.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
18.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri
19.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri
20.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri
21.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
22.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Wonogiri
23.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Wonogiri
24.	Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri (DISHUB)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Telp (0271) 781516 Fax. (0271) 782774

Nomor : B-3516/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/11/2022 Sukoharjo, 16 November 2022
 Lamp. :
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Pimpinan/Direktur/Manajer/Kepala
 Kesbangpol Kabupaten Wonogiri
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin penelitian atas :

Nama : **DINDA AYU PUSPITASARI**
 NIM : 195221274
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
 MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada
 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)
 Waktu : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

Dr. Awan Kostrad Diharjo, S.E. M.Ag
 NIP. 19651225200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 61 Wonogiri 57611
Telp. (0273) 321058, Faks. (0273) 321058
Website: dispورا.wonogirikab.go.id; Email: disporawonogiri@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 423.4/ 824

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri, Nomor: 071/ 817, Tanggal: 22 November 2022, Perihal: Surat Rekomendasi Penelitian.

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : TEGUH WIDODO, S.E., M.M.
NIP. : 19661111 198903 1 012
Pangkat/ Gol. : Pembina Tingkat I (IV/ b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri

Dengan ini menerangkan bahwa:

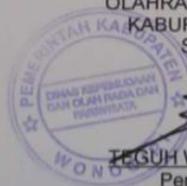
Nama : DINDA AYU PUSPITASARI
Alamat : Sembung 002/ 006, Candan, Sambu, Boyolali
Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri RM. SAID Surakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 21 November - 21 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonogiri, 30 November 2022

a.n. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIS,



(Signature)
TEGUH WIDODO, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661111 198903 1 012

Lampiran 6
Pendukung



Cek Plagiasi

Skripsi_Dinda Ayu Puspitasari

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

31%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dinda Ayu Puspitasari

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 07 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sembung RT 02/RW 06, Candan, Sambi, Boyolali

Agama : Islam

Nomor Telepon : 088215293840

Email : dindapuspitasari387@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. RA Daarul Falah Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar
2. SD N 1 Pandean, Ngemplak, Boyolali
3. MTs N Gondangrejo, Karanganyar
4. SMK Prawira Marta Kartasura
5. UIN Raden Mas Said Surakarta